

## IMPLEMENTASI APLIKASI DAPURDATA (PURDAT) DALAM PERCEPATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DARATAN DAN KEPULAUAN DI KABUPATEN SUMENEP

Denu Ilham Tawakkal<sup>1)</sup>, Sedarmayanti<sup>2)</sup>

<sup>1) 2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: denu.rsn@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Aplikasi DAPURDATA (PURDAT) dalam percepatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Kecamatan Daratan dan Kepulauan di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Aplikasi DAPURDATA (PURDAT) dalam percepatan penyusunan dokumen perencanaan merupakan bagian dari proses perencanaan yang semakin maju dan inovatif seiring dengan perkembangan teknologi yang mendukung sistem perencanaan pembangunan yang tepat waktu, efektif, dan efisien. Implementasi penerapan Aplikasi DAPURDATA (PURDAT) dalam percepatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang diluncurkan oleh BAPPEDA Kabupaten Sumenep belum mencapai 100% dan terdapat banyak kekurangan tetapi dalam pelaksanaannya penerapan aplikasi ini dinilai sebagai suatu keberhasilan BAPPEDA dalam memberikan pelayanan kepada perangkat daerah dalam percepatan penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai aturan dan tepat waktu.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Perencanaan Pembangunan, Aplikasi DAPURDATA

### Abstract

*This research aims to analyze the application of the DAPURDATA (PURDAT) application in accelerating the preparation of regional planning documents for Mainland and Islands Subdistricts in Sumenep Regency. This research aims to analyze the application of the DAPURDATA (PURDAT) application in accelerating the preparation of planning documents as part of an increasingly advanced and innovative planning process along with technological developments that support timely, effective and efficient development planning systems. The implementation of the DAPURDATA (PURDAT) Application in accelerating the preparation of regional apparatus planning documents launched by BAPPEDA Sumenep Regency has not yet reached 100% and there are many shortcomings but in its implementation the implementation of this application is considered as a success for BAPPEDA in providing services to regional apparatus in accelerating the preparation of planning documents according to the rules and on time.*

**Keywords:** Policy Implementation, Development Planning, DAPURDATA Application

### A. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dengan perencanaan yang tepat pembangunan dapat diarahkan secara terarah dan berkesinambungan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun indeks pembangunan manusia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keberhasilan dari suatu Perangkat Daerah harus didukung dengan adanya perencanaan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut adanya perencanaan yang baik adalah sistem tahapan perencanaan dari tindakan yang disusun agar tujuan organisasi yang akan ditetapkan dapat tercapai dan dapat teimplementasikan sesuai target yang diinginkan oleh perangkat daerah tersebut.

Dokumen Perencanaan adalah suatu dokumen yang berisi tugas dan target dari perangkat daerah yang telah ditentukan oleh perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di periode berikutnya yang berhubungan dengan program sampai dengan turunannya dengan memperhatikan situasi dan kondisi di tahun sebelumnya serta tahun berjalan. Kabupaten Sumenep terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan, dengan rata-rata letak kecamatan cukup jauh dari pusat kabupaten, terutama kecamatan yang berada di wilayah kepulauan, perlu menyeberang ke daratan dengan waktu yang cukup lama, dan tidak setiap hari terdapat kapal untuk menyeberang, hal ini menjadikan penyusunan dokumen perencanaan menjadi tidak tepat waktu atau terlambat. Dengan adanya hal tersebut BAPPEDA Kabupaten Sumenep meluncurkan aplikasi untuk memudahkan kecamatan yang berada di wilayah daratan maupun kepulauan dalam penyusunan dokumen perencanaannya, sehingga untuk mendapatkan verifikasi dari BAPPEDA hanya perlu mengupload saja ke aplikasi.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan seluruh bagian dari organisasi dan semua yang memiliki kepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keadaan serta peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi memiliki kejelasan serta sesuai dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Pada Tahun 2022 BAPPEDA Kabupaten Sumenep meluncurkan sebuah aplikasi Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, aplikasi tersebut

bernama DAPURDATA (PURDAT). Peluncuran aplikasi tersebut tidak luput dari tujuan Pemerintahan Kabupaten Sumenep dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Sumenep yang bertujuan untuk melaksanakan percepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Seperti Dokumen RENSTRA, RENJA, P-RENTA, P-RENJA dan LKPj. Percepatan ini dilakukan agar memudahkan bagi Perangkat Daerah Kecamatan dalam hal ini memudahkan akses, mengingat Kabupaten Sumenep terdapat beberapa kecamatan yang berada di Kepulauan. Dimana Perangkat Daerah hanya perlu mengupload file dokumen perencanaan ke DAPURDATA (PURDAT).

Terealisasinya Aplikasi Dapurdata (Purdar) menjadi sebuah hal yang baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, terdapat beberapa pro dan kontra dalam penggunaan aplikasi DAPURDATA (PURDAT) di beberapa Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan, dimana kecamatan harus melakukan perubahan sistem penusunan dokumen perencanaannya, dimana yang awalnya *hardcopy* menjadi *softcopy*, dimana yang awalnya *offline* menjadi *online*. Sehingga dengan dibuat dan diterapkannya Aplikasi DAPURDATA (PURDAT) dapat mempercepat penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah kecamatan daratan dan kepulauan, sebaliknya memperlambat penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

## B. LANDASAN TEORITIS

### 1. Teori Implementasi

Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Sedangkan tolak ukur keberhasilan suatu implementasi adalah lebih kepada dampak yang diberikan setelah pengimplementasian itu diberlakukan, menjadi ke arah yang lebih baik atau sebaliknya Menurut Tresiana dan Duadji (2019:84) Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh *delivery mechanism* (*mekanisme penyampaian*), yakni bagaimana

keluaran-keluaran kebijakan (*policy output*) dapat sampai kepada kelompok sasaran dengan berbagai kriteria tepat seperti, tetap sasaran, waktu, kualitas, dan lain-lain untuk menjamin munculnya hasil kebijakan (*policy outcomes*), baik hasil kebijakan yang langsung dirasakan (*initial outcomes*) maupun yang akan muncul dalam jangka panjang (*long-term outcomes*).

## 2. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

Mayer (1985:16) menambahkan bahwa perencanaan memiliki kaitan dengan penyusunan dan penetapan kebijakan (*policy making*). Bahkan diantara keduanya bisa dipertukarkan. Menurut Mayer perkembangan historis dari literatur dan tidak memiliki arti yang melekat dari setiap istilah menjadikan penyebab timbulnya perbedaan dari keduanya. James E Anderson (1978: 3) menyatakan bahwasannya kebijakan merupakan “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”.

## 3. Dasar Hukum Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Pasal (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini di rancang oleh perangkat daerah dengan menyusun RPJMD dan kemudian menjadi rencana strategis 5 tahunan kemudian di turunkan menjadi rencana kerja tahunan.

## 4. Pelayanan Publik

Pelayanan publik sebagaimana di kemukakan Mahmudi (2005:229) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam konteks pelayanan, menurut Thoha (dalam INDEF, 1999 : 14) mengemukakan pelayanan umum adalah lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik. Moenir (2006) menjelaskan bahwa pelayanan yang baik dan memuaskan yakni adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan, mendapatkan pelayanan wajar, mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih, mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengertian metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong (2011:4) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan metode penelitian dijelaskan oleh Kirk dan Miller dalam buku Moleong (2011:4) bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

### 2. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan implementasi penggunaan aplikasi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berlangsung di Kecamatan yang berada di Kabupaten Sumenep, maka diperlukan sebuah penelitian tentang “Implementasi Aplikasi Dapurdata (Purdar) Dalam Percepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Daratan Dan Kepulauan Di Kabupaten Sumenep”, maka Penulis berfokus pada Implementasi Aplikasi yang diluncurkan oleh BAPPEDA Kabupaten Sumenep.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang benar dan sesuai dengan keadaan dilapangan atas tindak lanjutnya. Alternatif alasan penulis memilih lokasi penelitian di Bappeda, Kecamatan Pasongsongan, Kecamatan Rubaru, dan Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep

## **D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1. Perencanaan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Kabupaten Sumenep**

Dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah di kecamatan, Kasubbag Program, Perencanaan dan Keuangan, memiliki peran penting dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah, dokumen perencanaan yang disusun berupa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan LKPj Akhir tahun anggaran, tugas dan fungsi Kasubbag Program, Perencanaan dan Keuangan. Dalam tahapannya terdapat tahapan verifikasi dokumen perencanaan yang dilakukan oleh Tim BAPPEDA Kabupaten Sumenep untuk menentukan kesesuaian Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan di tahun selanjutnya. penyelesaian dokumen perencanaan menjadi hal yang terpenting karena akan berdampak terhadap dokumen perencanaan lainnya, hal ini yang mendorong Bappeda Kabupaten Sumenep meluncurkan aplikasi DAPURDATA (PURDAT) agar penyusunan dokumen perencanaan selesai tepat waktu.

### **2. Implementasi Aplikasi Dapurdata (Purdar) Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan**

Dapurdata (Purdar) merupakan aplikasi yang diluncurkan BappedA Kabupaten

Sumenep pada awal tahun 2022. Dapurdata (Purdar) menghimpun seluruh dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja, Rencana Strategis, Rencana Kerja Perubahan, Rencana Strategis Perubahan sampai dengan LKPj perangkat daerah. Diluncurkannya aplikasi tersebut dimaksudkan BAPPEDA Kabupaten Sumenep untuk memberikan layanan kepada perangkat daerah terutama Kecamatan baik di wilayah daratan maupun kepulauan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, harapan diluncurkannya aplikasi Dapurdata (Purdar) agar kecamatan dapat dengan mudah menyelesaikan dokumen perencanaan tanpa harus ke Bappeda Kabupaten Sumenep mengingat beberapa kecamatan berada di jarak yang cukup jauh dari pusat kabupaten. Aplikasi ini memudahkan Bappeda Kabupaten Sumenep dalam mengontrol perkembangan penyusunan yang dilakukan oleh perangkat daerah. Dalam penerapannya, BAPPEDA Kabupaten Sumenep telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah mengenai penggunaan aplikasi tersebut sehingga perangkat daerah dapat siap menerapkan aplikasi ini dalam penyusunan dokumen perencanaannya. Aplikasi ini juga dinilai mudah untuk digunakan, Dalam penerapannya terdapat perangkat daerah yang merasa belum siap, dikarenakan aplikasi ini dinilai tidak ramah pengguna, selain itu kasubbag program juga terbebani dengan aplikasi lain yang diluncurkan oleh dinas lainnya, Dalam penerapannya terdapat perbedaan pendapat antara perangkat daerah dan BAPPEDA Kabupaten Sumenep, aplikasi ini dinilai cukup sulit untuk digunakan bagi pegawai yang akan memasuki masa purna tugas, tetapi sangat mudah di gunakan bagi pengguna yang masih relatif berusia muda.

### **3. Manfaat Penerapan Aplikasi Dapurdata (Purdar) Dalam Percepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan**

Implementasi penerapan aplikasi Dapurdata (Purdar) yang diluncurkan oleh Bappeda Kabupaten Sumenep merupakan transformasi dan inovasi sistem penyusunan

dokumen perencanaan yang diharapkan menjadi suatu solusi bagi perangkat daerah terumata kecamatan yang berada di wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyusunan dokumen perencanaannya. Kemunculan aplikasi ini dapat memberikan dampak positif dalam dalam percepatan penyelesaian dokumen perencanaan perangkat daerah. Berdasarkan data yang didapat berkaitan tentang penerapan aplikasi DAPURDATA (PURDAT) dalam percepatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah kecamatan daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep, dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang menyakut tentang perencanaan yang telah ditetapkan dengan undang-undang.

Dokumen perencanaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku bertujuan agar program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di tahun berikutnya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Perencanaan yang sesuai aturan yang berlaku juga bertujuan agar program-program terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perangkat daerah. Dengan penerapan aplikasi ini juga Kasubbag yang berada di kecamatan dalam menyusun dokumen perencanaannya, karena di dalam aplikasi ini terdapat aturan-aturan yang emuat tentang system perencanaan. Sehingga dalam menyusun dokumen perencanaan Kasubba tidak perlu mencari aturan kereba sudah termuat di dalam aplikasi ini. tingkat keamanan data juga lebih terminimalisasi karena setiap perangkat daerah memiliki username tersendiri. Penyusunan dokumen perencanaan juga dilakukan secara tepat waktu, kerana di dalam aplikasi terdapat jadwal penyusunannya dimana batas upload dokumen ada batasan waktunya. Penerapan aplikasi Dapurdata (Purdad) dalam percepatan penyusunan dokumen di kabupaten Sumenep, memberikan banyak manfaat, penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan menjadi sangat efisien dan juga efektif. Keuntungan penerapan

aplikasi Dapurdata (Purdad) yaitu seluruh dokumen perencanaan dapat sesuai dengan aturan yang berlaku, dikarenakan seluruh dokumen perencanaan disusun dengan pedoman dan aturan yang ada di dalam aplikasi Dapurdata (Purdad), tingkat keamanan data juga lebih terminimalisasi karena setiap perangkat daerah memiliki username tersendiri. Penerapan aplikasi Dapurdata (Purdad) dalam percepatan penyusunan dokumen di kabupaten Sumenep, memberikan banyak manfaat, penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan cenderung lebih hemat biaya bagi pihak kecamatan apabila dibandingkan dengan sebelum penggunaan aplikasi ini.

#### **4. Kendala Penerapan Aplikasi Dapurdata (Purdad) Dalam Percepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan**

Pada dasarnya, kendala yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Sumenep dalam penerapan aplikasi Dapurdata (Purdad) cukup banyak karena kendala yang didapat terjadi di aspek teknis aplikasi dan aspek personalnya. Kendala teknis yang di hadapi yaitu di beberapa kecamatan wilayah kepulauan aliran listrik menyala pada malam hari saja sehingga halm ini dapat menghambat penyusunan dokumen perencanaan, mengingat aplikasi Dapurdata (Purdad) memerlukan aliran listrik dalam penggunaan perangkat elektronik faktor lain yang menjadikan kendala yaitu jaringan internet kantor yang belum merata terutama di wilayah kepulauan, mengingat aplikasi ini menggunakan system online. Kendala teknis yang terjadi yaitu keterbatasan server yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sendiri. Hal ini di sebabkan server tidak hanya menampung aplikasi DAPURDATA (PURDAT) saja melainkan ada banyak aplikasi lain yang dimiliki oleh BAPPEDA, selain itu dari aplikasi DAPURDATA (PURDAT) menyumbang penyimpanan yang cukup besar bagi server. Kendala personal yang di hadapi yaitu terkait dengan sumber daya

manusia yang mendukung proses ini, di beberapa kecamatan terdapat kasubbag program yang akan memasuki purna sehingga hal ini disebabkan karena aplikasi dinilai sulit untuk digunakan oleh pegawai yang sudah senior.

Kendala lain menjadi kendala yang cukup serius, karena secara tugas dan fungsi, yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah adalah Kasubbag Program, namun di lapangan penyusunan dokumen perencanaan di delegasikan atau di tugaskan kepada Kasi Kemanan dan Ketertiban karena dianggap lebih memahami Aplikasi DAPURDATA (PURDAT). Kendala aplikasi yang dihadapi yaitu yaitu beberapa menu yang ada di aplikasi belum optimal, pada jadwal penyusunan, jadwal masih harus manual dibuka oleh admin BAPPEDA, manualnya pembukaan jadwal penyusunan ini, menjadi faktor keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan. Setelah melakukan hasil observasi langsung pada aplikasi penulis juga menemukan permasalahan terkait aplikasi DAPURDATA (PURDAT), kendala yang terjadi adalah belum adanya notifikasi terkait dokumen perencanaan yang telah diverifikasi oleh BAPPEDA ke pengguna aplikasi. Kendala yang terjadi di aplikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap kecamatan dalam percepatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

##### **5. Solusi Dalam Penyelesaian Kendala Penerapan Aplikasi Dapurdata (Purdat) Dalam Percepatan Penyusunan Dokumen Perencanaan**

Pada dasarnya, kendala yang dihadapi oleh BAPPEDA Kabupaten Sumenep dalam penerapan aplikasi DAPURDATA (PURDAT) cukup banyak, dari beberapa kendala tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi BAPPEDA, sehingga dapat merumuskan solusi- solusi untuk menyelesaikan kendala dan permasalahan yang timbul dari penerapan aplikasi DAPURDATA (PURDAT) dalam

penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah kecamatan daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep. Koordinasi dan Kerjasama dalam mengatasi Kendala Teknis yang di hadapi yaitu di beberapa kecamatan wilayah kepulauan aliran listrik menyala pada malam hari saja sehingga hal ini dapat menghambat penyusunan dokumen perencanaan, mengingat aplikasi DAPURDATA (PURDAT) memerlukan aliran listrik dalam penggunaan perangkat elektronik faktor lain yang menjadikan kendala yaitu jaringan internet kantor yang belum merata terutama di wilayah kepulauan, mengingat aplikasi ini menggunakan sistem online. Kendala personal yang dihadapi yaitu terkait dengan sumber daya manusia yang mendukung proses ini, di beberapa kecamatan terdapat kasubbag program yang akan memasuki purna sehingga hal ini disebabkan karena aplikasi dinilai sulit untuk digunakan oleh pegawai yang sudah senior.

Penyempurnaan dan upgrade aplikasi untuk mengatasi kendala aplikasi yang di hadapi yaitu yaitu beberapa menu yang ada di aplikasi belum optimal, pada jadwal penyusunan, jadwal masih harus manual dibuka oleh admin BAPPEDA, manualnya pembukaan jadwal penyusunan ini, menjadi faktor keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan, seperti yang di alami Kecamatan Pasongsongan pada saat akan meng-upload dokumen ternyata jadwal belum dibuka oleh admin. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah mulai mengkaji kembali apa yang perlu di tambahkan pada aplikasi ini. Setelah melakukan hasil observasi langsung pada aplikasi penulis juga menemukan solusi penyelesaian permasalahan terkait aplikasi Dapurdata (Purdat), solusi yang perlu dilakukan Bappeda Kabupaten Sumenep dengan menambahkan notifikasi pada halaman dashboard sehingga ketika user kecamatan membuka aplikasi ini bisa mengetahui apakah dokumen perencanaannya telah selesai di verifikasi atau belum.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saya mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Walaupun implementasi aplikasi Dapurdata (Purdat) dalam percepatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Kecamatan Daratan dan Kepulauan di Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Sumenep belum mencapai 100% dan terdapat banyak kekurangan tetapi dalam pelaksanaannya penerapan aplikasi ini dinilai sebagai suatu keberhasilan BAPPEDA dalam memberikan pelayanan kepada perangkat daerah dalam percepatan penyusunan dokumen perencanaan yang seluai aturan dan tepat waktu.
- b) Dalam penerapan aplikasi DAPURDATA (PURDAT) terdapat beberapa manfaat yang di dapat diantaranya adalah:
  - (1) Dokumen perencanaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku bertujuan agar program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di tahun berikutnya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.
  - (2) Tingkat keamanan data dokumen perencanaan juga lebih aman karena setiap perangkat daerah memiliki username tersendiri.
  - (3) Penyusunan dokumen perencanaan juga dilakukan secara tepat waktu, kerana di dalam aplikasi terdapat jadwal penyusunannya dimana batas upload dokumen ada batasan waktunya.
- c) Diantara banyaknya manfaat penerapan aplikasi DAPURDATA (PURDAT) tentu ada kendala yang terjadi selama penerapan sistem non tunai ini diantaranya adalah:
  - (1) Kurangnya koordinasi antara BAPPEDA dengan *stakeholder* terkait dalam penerapan aplikasi DAPURDATA (PURDAT) di Kabupaten Sumenep.

- (2) Kurangnya dari kecamatan kurang familiar dengan penyusunan dokumen perencanaan secara online. Sumber Daya Manusia pada beberapa kecamatan yang kurang mumpuni untuk menerapkan aplikasi DAPURDATA (PURDAT).

- (3) Kurang lengkapnya menu yang tersedia di aplikasi DAPURDATA (PURDAT) untuk mencapai tujuan percepatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Kecamatan dan Kepulauan di Kabupaten Sumenep.

### 2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dipaparkan berikut adalah rekomendasi yang diajukan oleh peneliti diantaranya:

- a) Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait aliran listrik, sebaiknya BAPPEDA Kabupaten Sumenep melakukan koordinasi dengan pihak PLN untuk mengatasi masalah tersebut, solusi lain yang dapat dilakukan adalah kecamatan menganggarkan untuk pengadaan mesin jenset pembangkit listrik agar bisa menggunakan listrik di siang hari.
- b) Sebaiknya BAPPEDA Kabupaten Sumenep bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep terkait pemerataan jaringan internet kantor, supaya semua perangkat daerah terutama kecamatan dapat dengan mudah mengakses aplikasi secara online.
- c) Sebaiknya BAPPEDA Kabupaten Sumenep melakukan Pendampingan terhadap perangkat daerah dalam penerapan aplikasi DAPURDATA (PURDAT) dan melakukan penyegaran sumber daya manusia.
- d) Sebaiknya BAPPEDA Kabupaten Sumenep melakukan penyempurnaan dan upgrade aplikasi untuk mengatasi beberapa menu aplikasi yang belum optimal, seperti jadwal penyusunan, dan

menu yang menampung dokumen hasil verifikasi.

## REFERENSI

- Agung, K. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Edward III, & George, C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, M. (2014). *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Publica Institute.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Narwawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subarsono, A. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alfa Riau.
- Supranto, J. (2000). *Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Winarno, B. (2013). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS Center of Academic Publishing Service.